



**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**T E N T A N G  
P E N J A B A R A N  
A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H  
T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 1**



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 75);
28. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 20);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.



15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

## **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.646.554.605.366,00 (Enam ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.42.403.661.449,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;



- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.569.000.000,00 (Lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.427.881.184,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.402.248.605,00 (Sembilan milyar empat ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.004.531.660,00 (Dua puluh lima milyar empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).

### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah);
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah)
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);
  - f. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
  - g. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 1.135.000.000,00 (Satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 562.118.320,00 (Lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 1.755.762.864,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
  - c. Ritribusi Perijinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagi laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 9.402.248.605,00 (Sembilan milyar empat ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah)
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) terdiri dari:



- a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 2.225.594.000,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- b. Jasa giro direncanakan sebesar Rp. 1.858.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- c. Pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);
- g. Pendapatan denda retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 8.250.000,00 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah);
- j. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) direncanakan sebesar Rp. 3.807.687.660,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah).

#### **Pasal 6**

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 579.139.743.917 (Lima ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 564.479.522.000,00 (Lima ratus enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp. 14.660.221.917,00 (Empat belas milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)

#### **Pasal 7**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.511.200.000,00 (Tujuh milyar lima ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah dana bos.

#### **Pasal 8**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.646.554.605.366,00 (Enam ratus empat puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja tidak terduga
- d. Belanja Transfer

#### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.089.053.091,00 (Empat ratus tiga puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa



- c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 216.830.077.451,00 (Dua ratus enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 191.075.212.273,00 (Seratus sembilan puluh satu milyar tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
  - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
  - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.324.763.367,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)
  - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.059.000.000,00 (Tiga milyar lima puluh sembilan juta rupiah)

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 126.327.500.749,00 (Seratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat puluh sembilan rupiah)
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 73.350.560.823,00 (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 8.981.581.691,00 (Delapan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 7.449.103.868,00 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah)
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 219.730.320,00 (Dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 42.400.634.156,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah)
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 104.440.068.392,00 (Seratus empat milyar empat ratus empat puluh juta enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)
  - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 10.944.733.241,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)
  - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 30.558.403.084,00 (Tiga puluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga ribu delapan puluh empat rupiah)



- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 2.650.893.400,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
  - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp 35.480.000,00 ( Tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp. 15.233.715.091,00 (Lima belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah)
  - b. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp. 7.475.720.000,00 (Tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp. 615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga di rencanakan sebesar Rp. 169.000.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
  - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.575,000.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

#### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.118.532.381.533,00 (Seratus delapan belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.179.063.844,00 (Empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.533.907.261,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.160.855.539,00 (Enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).



- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 230.353.750,00 (Dua ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

## **Pasal 12**

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 1.428.201.139,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 39.060.000,00 (Tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah)
  - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 936.152.750,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 253.225.330,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
  - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 76.476.940,00 (Tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 1.745.651.050,00 (Satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh rupiah)
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 75.600.000,00 (Enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 3.443.945.000,00 (Tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
  - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 2.472.018.324,00 (Dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
  - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 5.017.578.891,00 (Lima milyar tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)
  - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 42.509.000,00 (Empat puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah)
  - k. Belanja modal peralatan proses/produksi direncanakan sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
  - l. Belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp. 75.946.559,00 (Tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam lima ratus lima puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 31.337.101.263,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 2.196.805.998 (Dua milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 54.317.253.783,00 (Lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)



- b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 10.142.440.456,00 (Sepuluh milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
  - c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp. 104.805.000,00 (Seratus empat juta delapan ratus lima ribu rupiah)
  - d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp. 4.596.356.300,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 56.625.000,00 (Lima puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp. 131.178.750,00 (Seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - c. Belanja modal biota perairan direncanakan sebesar Rp. 42.550.000,00 (Empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 13**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.547.050.000,00 (Sembilan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### **Pasal 14**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 83.386.120.742,00 (Delapan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.595.121,00 (Delapan ratus sepuluh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.575.525.621,00 (Delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)

### **Pasal 15**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.17.500.000.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

### **Pasal 16**

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.607.500.000,00 (Tiga puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.107.500.000,00 (Enam belas milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal Daerah.



- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah)
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.107.500.000,00 (Sepuluh milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

### **Pasal 18**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.17.500.000.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 19**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sukamara ini terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek , Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima , Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

### **Pasal 20**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### **Pasal 21**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara

pada tanggal 15 Februari 2021



Diundangkan di Sukamara

pada tanggal 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 2



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>42.403.661.449</b>
4.1.01	Pajak Daerah	5.569.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	15.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	15.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	700.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	698.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	6.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	6.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	120.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	120.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	3.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	3.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	250.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.135.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.135.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	255.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	102.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	153.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.427.881.184
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	562.118.320
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	72.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	60.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	298.618.320
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.500.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.755.762.864
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	558.942.864
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	110.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	256.620.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	110.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.200.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	528.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	186.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.402.248.605



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.402.248.605
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.402.248.605
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.004.531.660
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.225.594.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.225.594.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.858.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.858.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	105.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	12.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	78.000.000
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	8.250.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	7.750.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	500.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	150.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	15.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	15.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.807.687.660
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.807.687.660
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>579.139.743.917</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	564.479.522.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	504.108.905.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	42.170.291.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	394.536.235.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.096.430.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	26.305.949.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	20.617.442.000
4.2.01.02.01	DID	20.617.442.000
4.2.01.05	Dana Desa	39.753.175.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	39.753.175.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.660.221.917
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	14.660.221.917
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.660.221.917



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.511.200.000</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.511.200.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	7.511.200.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.511.200.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>629.054.605.366</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>435.089.053.091</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	216.830.077.451
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	126.327.500.749
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	93.838.709.384
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	93.838.709.384
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	8.963.661.377
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.963.661.377
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.514.020.857
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.514.020.857
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.489.386.236
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.489.386.236
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.715.765.794
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.715.765.794
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.546.654.398
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.546.654.398
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	127.944.780
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	127.944.780
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.167.764
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.167.764
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	4.331.245.580
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.331.245.580
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	246.402.547
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	246.402.547
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	693.842.581
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	693.842.581
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	856.699.451
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	856.699.451
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.350.560.823
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	67.301.837.823
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	67.301.837.823
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.201.675.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.201.675.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	873.048.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	873.048.000
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.974.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.974.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.981.581.691
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	278.450.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	750.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	35.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	300.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	150.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	150.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	4.250.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.500.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	56.750.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.750.000
5.1.01.03.01.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0
5.1.01.03.01.007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.03.01.008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0
5.1.01.03.01.009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0
5.1.01.03.01.010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0
5.1.01.03.01.013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0
5.1.01.03.01.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	97.406.691
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.600.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.000.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	200.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	13.015.548
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.750.000
5.1.01.03.02.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.600.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	27.909.643
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.000.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	12.831.000
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	5.500.000
5.1.01.03.02.002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	310.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.150.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	5.540.500
5.1.01.03.02.004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0
5.1.01.03.02.005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0
5.1.01.03.02.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.02.013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0
5.1.01.03.02.014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0
5.1.01.03.02.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0
5.1.01.03.02.018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0
5.1.01.03.02.019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0
5.1.01.03.02.021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	0
5.1.01.03.02.022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0
5.1.01.03.02.024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0
5.1.01.03.02.025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.029.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.067.665.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.181.935.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB)	780.000.000
5.1.01.03.07.001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.576.125.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	219.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.357.125.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.449.103.868



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.900.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.900.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	49.219.840
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	49.219.840
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.355.720
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.355.720
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.320.940
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	9.320.940
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	41.500.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	41.500.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	24.900
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	24.900
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	799.084.968
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	39.244.968
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	960.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.880.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	756.000.000
5.1.01.04.12.001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.142.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.142.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.355.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.355.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	219.730.320
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.692.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.692.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.768.720
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.768.720
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	141.015.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	141.015.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.318.525
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.318.525
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.500.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.500.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.500
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.500



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.976.310
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.976.310
5.1.01.05.07.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	0
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	114.566
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	114.566
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	343.699
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	343.699
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.01.06.02.001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.075.212.273
5.1.02.01	Belanja Barang	42.400.634.156
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.400.634.156
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.568.376.943
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	126.955.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.907.899.662
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	144.152.476
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	93.730.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	147.800.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.240.910.378
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.028.420.880
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	83.905.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.295.009.630
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.252.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.458.169.094
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	205.320.000
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	84.378.518
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	357.292.582
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.240.000
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	1.680.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	21.080.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	233.078.662
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.230.223.622
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	303.656.499
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	172.672.800



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.652.788.710
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.084.038.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	172.344.000
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.228.658.300
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.097.340.100
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	84.321.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	136.870.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	991.571.800
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	40.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	673.550.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	226.233.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	131.000.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.000.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	8.400.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	198.400.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	94.150.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	647.675.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	184.090.000
5.1.02.01.01.008	Belanja Pengisian Tabung Gas	0
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.019	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	0
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.01.036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.003	Belanja Bibit Ternak	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.006	Belanja Bahan Laboratorium	0
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	0
5.1.02.01.02.008	Belanja Bahan Makanan Ternak/Binatang	0
5.1.02.01.02.017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.018	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.02.019	Belanja Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.021	Belanja Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai	0
5.1.02.01.02.022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.023	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	0
5.1.02.01.02.024	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.025	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	0
5.1.02.01.02.026	Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai	0
5.1.02.01.02.028	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.04.005	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0
5.1.02.01.05.003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.07.006	Belanja Pakaian Jas/Safari	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	104.440.068.392
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	85.429.184.140
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	183.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.617.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.569.414.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	131.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.650.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	935.750.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.080.000
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	91.290.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	728.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.407.354.680
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	37.400.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	430.615.500



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	220.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	94.500.000
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	28.160.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	166.670.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	36.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.287.998.500
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.323.840.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.958.920.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	166.006.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.513.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.215.885.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	758.880.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	141.840.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	180.806.320
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	72.250.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	104.800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	92.230.993
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	15.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.500.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.120.976.045
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	15.400.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	343.520.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.055.600.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	40.450.000
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	0
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	21.040.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	293.433.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	143.853.750
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	150.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.268.112.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	28.972.000
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	48.678.196
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.772.250.856
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	647.932.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.797.976.800
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	86.997.500
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	49.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	528.305.000
5.1.02.02.01.007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	339.445.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	140.000.000
5.1.02.02.01.008	Belanja Jasa Penyuluh Non ASN	0
5.1.02.02.01.009	Belanja Jasa Rohaniawan	0
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0
5.1.02.02.01.012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0
5.1.02.02.01.013	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.017	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	0
5.1.02.02.01.020	Belanja Paket/Pengiriman	0
5.1.02.02.01.022	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0
5.1.02.02.01.040	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	0
5.1.02.02.01.041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	0
5.1.02.02.01.044	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	0
5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	0
5.1.02.02.01.048	Belanja Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan	0
5.1.02.02.01.049	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	0
5.1.02.02.01.051	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0
5.1.02.02.01.056	Belanja Jasa Penyewaan	0
5.1.02.02.01.058	Belanja Jasa Akomodasi	0
5.1.02.02.01.059	Belanja Jasa Angkutan Penumpang	3.400.000
5.1.02.02.01.062	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0
5.1.02.02.01.084	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.065.274.016
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	228.984.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	10.331.575.672
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	249.615.264
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	223.099.080
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	30.000.000
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	288.935.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	37.600.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13.300.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	233.035.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	19.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.500.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.009	Belanja Sewa Alat Kesenian	0
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07.001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.010	Belanja Jasa Konsultansi Perancangan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.323.813.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	200.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	349.400.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	114.413.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	430.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	50.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	180.000.000
5.1.02.02.08.008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0
5.1.02.02.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.333.558.440
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	465.658.440
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	567.900.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	500.000.000
5.1.02.02.09.001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	400.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	300.000.000
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	100.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.895.642.796
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	1.895.642.796
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	30.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.054.161.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.010.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.044.161.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.944.733.241
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.961.802.592
5.1.02.03.02.0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	8.000.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	40.800.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.200.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	652.420.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	40.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	71.222.500
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	488.100.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.300.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.500.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.260.092
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	12.000.000
5.1.02.03.02.0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	20.000.000
5.1.02.03.02.034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0
5.1.02.03.02.036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	76.500.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	483.500.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000
5.1.02.03.02.113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0
5.1.02.03.02.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0
5.1.02.03.02.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubelair	0
5.1.02.03.02.120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.500.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.1.02.03.02.144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	0
5.1.02.03.02.145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	0
5.1.02.03.02.406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	27.500.000
5.1.02.03.02.410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	996.747.972
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	439.684.390
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	99.797.280
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	82.605.500
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	374.660.802
5.1.02.03.03.030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.986.182.677
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	7.923.282.677
5.1.02.03.04.003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	62.900.000
5.1.02.03.04.019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	0
5.1.02.03.04.023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	600.000
5.1.02.03.06.003	Belanja Minyak Pelumas	0
5.1.02.03.06.004	Belanja Jasa KIR	0
5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	30.558.403.084
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.558.403.084
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.444.063.195
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	988.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.923.314.289
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.013.490.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.189.035.600
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.03	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas	0
5.1.02.04.03.001	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah	0



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.650.893.400
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.074.338.400
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	537.610.400
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	531.728.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.000.000
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.576.555.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.515.530.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	61.025.000
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0
5.1.02.05.03.001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.03.002	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.480.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.480.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.480.000
5.1.04	Belanja Subsidi	800.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	800.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	800.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	800.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	23.324.763.367
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.233.715.091
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.205.395.091
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.205.395.091
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.810.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.810.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.218.320.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.218.320.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.475.720.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	7.475.720.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	7.475.720.000
5.1.05.06.01.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...	0
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.059.000.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.315.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.315.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.315.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	169.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	169.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	169.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.575.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.575.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.575.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.532.381.533</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.428.201.139
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.428.201.139
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.270.201.139
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	25.001.139
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	45.200.000
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	1.200.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	158.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	25.000.000
5.2.01.01.03.0010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan	133.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.179.063.844
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	39.060.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	39.060.000
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	5.590.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	33.470.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	936.152.750
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	930.719.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	702.970.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	227.749.000
5.2.02.02.01.002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.433.750
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	5.433.750
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	253.225.330
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.343.250
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.343.250
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	29.032.080
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	16.508.080
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	12.524.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	218.850.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.480.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	213.500.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.870.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	76.476.940



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	76.476.940
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	18.405.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	35.410.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	22.661.940
5.2.02.04.01.001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0
5.2.02.04.01.008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.745.651.050
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	568.674.300
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	166.698.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	401.976.300
5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.069.547.750
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	417.115.750
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	55.665.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	317.649.500
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.772.500
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	274.745.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.600.000
5.2.02.05.02.001	Belanja Modal Meubelair	0
5.2.02.05.02.003	Belanja Modal Alat Pembersih	0
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	107.429.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	55.792.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	21.385.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	30.252.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	75.600.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	25.600.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.600.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0
5.2.02.06.01.003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	50.000.000
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	50.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.443.945.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.244.870.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	339.535.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.000.000.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	517.835.000
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	44.500.000
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	33.000.000
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	310.000.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	199.075.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	199.075.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.472.018.324
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.450.800.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	800.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	2.450.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	21.218.324
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.000.000
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	15.091.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	3.127.324
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.017.578.891
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.356.108.811
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.179.100.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.010.687.817
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	166.320.994
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	661.470.080
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	192.810.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	463.660.080
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	42.509.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	42.509.000
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	3.120.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	12.489.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	26.900.000
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	900.000
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	900.000
5.2.02.17.01.0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	900.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	75.946.559
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	75.946.559
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	70.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	5.946.559
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.533.907.261
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	31.337.101.263
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.337.101.263
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.975.409.648
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	205.998.000
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.890.426.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.900.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	320.725.700
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	14.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	199.896.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	413.044.500
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.120.138.625



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.978.214.211
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	107.350.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	99.998.579
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.196.805.998
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.196.805.998
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.196.805.998
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.160.855.539
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.317.253.783
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	53.296.021.434
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	43.128.732.120
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	1.298.379.510
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	785.200.000
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	6.195.703.564
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.888.006.240
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.021.232.349
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	790.261.219
5.2.04.01.02.0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	230.971.130
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.142.440.456
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.134.742.056
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	7.779.210.056
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	355.532.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0
5.2.04.02.06.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.007.698.400
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	2.007.698.400
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	104.805.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	104.805.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	104.805.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.596.356.300
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	353.232.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	353.232.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	51.300.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	51.300.000
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	4.191.824.300
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	4.191.824.300
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	230.353.750
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	56.625.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	0
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	56.625.000



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	56.625.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	131.178.750
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	131.178.750
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	131.178.750
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	42.550.000
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	42.550.000
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	42.550.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.547.050.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.547.050.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.547.050.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	9.547.050.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	9.547.050.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>83.386.120.742</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	810.595.121
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	564.439.999
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	564.439.999
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	564.439.999
5.4.01.01.03.001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	0
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.155.122
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.155.122
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	246.155.122
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	82.575.525.621
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	445.000.000
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	445.000.000
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	445.000.000
5.4.02.01.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...	0
5.4.02.02.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...	0
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	82.130.525.621
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	42.377.350.621
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	42.377.350.621
5.4.02.05.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.753.175.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	39.753.175.000
5.4.02.05.02.001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...	0
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>646.554.605.366</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(17.500.000.000)</b>



**KABUPATEN SUKAMARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>33.607.500.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.607.500.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	10.000.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	10.000.000.000
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	23.607.500.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	9.607.500.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	9.607.500.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	10.000.000.000
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.000.000.000
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	5.000.000.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>33.607.500.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>16.107.500.000</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.107.500.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.107.500.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.107.500.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.107.500.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>16.107.500.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>17.500.000.000</b>

Sukamara, 15 Februari 2021  
 BUPATI SUKAMARA,  
  
 WINDU SUBAGIO